

BIBLIOGRAPHY

Book :

- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana. Jakarta. 2012.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Apeldoorn, L. J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1985.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- _____. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuna Ilmu Populer. Jakarta. 2007.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010.
- _____. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- _____. *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press. Jakarta. 2006.
- _____. *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta, 2020.
- _____. dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet 1, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. 2006.
- _____. dan Safa'at, Ali. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Pers, Jakarta. 2022.
- Asmarudin, Imam & Sugiharto, Imawan. *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*. Diya Media Group. Brebes. 2020.
- Azhari. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*. UI Press. Jakarta. 1995.
- Aziz, Machfud. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. 2010.
- Bakunin, Mikhail. *Tuhan dan Negara*. Pabel. Yogyakarta. 2017.
- Benda, Ernst. *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*. Konrad Adenauer Stiftung. Jakarta. 2005.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta. 1977.
- Cicero, Marcus Tullius. *How To Run a Country Panduan Klasik untuk*

- Pemimpin Modern*. KPG. Jakarta. 2023.
- Crince le Roy. *Kekuasaan Keempat Pengenalan Ulang*. diterjemahkan oleh Soehardjo. Yayasan Dharma Bakti. Semarang. 1981.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Gramada, Jakarta. 1984.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama. Bandung. 2009.
- Garesche, Eugene D. *Guidelines for The International Relations of Local Governments and Decentralised Cooperation between The European Union and Latin America Volume 1*. Barcelona. Barcelona Council. 2007.
- Hadjar, A. Fickar. *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. KRHN dan Kemitraan. Jakarta. 2003.
- Hasani, Ismail. *Pengujian Konstitusional Perda*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta. 2020.
- Hatta, Moh. *Demokrasi Kita*. Segi Arsy. Bandung. 2018.
- Hamilton, Alexander. *The Federalist Papers*. Mentor Book. The New American Library. 1961.
- Harris, Bede. *Essential Constitutional Law*. Sydney-London-Portland. Oregon. Cavendish Publishing. 2001.
- Hotma P. Sibuea. *Ilmu Negara*. Erlangga. Jakarta. 2014.
- Huda, Ni'matul. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. FH UII Press. Yogyakarta. 2011.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang. 2005.
- Indrati, Maria Farida. S. *Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta. 2007.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2010.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media. Bandung. 2014.
- _____. *Pengantar Teori Hukum*. Nusa Media. Bandung. 2012.
- Kusnadi, Moh dan Bintang Saragih. *Ilmu Negara*. Gaya Medan Pratama. Jakarta. 2016.
- Krisnayudha, Becky. *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2016.
- Laski, Harold J. *The State in Theory and Practice*. The Viking Press. New

York. 1947.

Mahfud MD, Moh. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993.

_____. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, RajaGrafindo. Jakarta. 2013.

_____. *Politik Hukum di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2020.

Mahkamah Konstitusi RI, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa : Pemikiran Hukum Dr. Harjono Wakil Ketua MK*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2010.

_____. dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993.

Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Buku Mojok Grup, Yogyakarta. 2022.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Djambatan. Jakarta. 2002.

Nanda, Aslama Rizal. *Bung Karno dan Asmara Hadi Pertautan Ideologis Guru dan Murid*. Semut Api. Yogyakarta. 2024.

Nasroen. *Asal Mula Negara*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya. 1986.

Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Nusa Media. Bandung. 2014.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006.

Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. 1998.

Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 2016.

Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2007.

Riwanto, Agus. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Thafa Media. Yogyakarta. 2016.

Safa'at, Ali, dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2019.

Sedarmayanti. *Good Governance Bagian Kedua : Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Peningkatan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Mandar Maju. Bandung. 2004.

_____. *Good Governance dan Good Corporate Governance*, Mandar

Maju, Bandung, 2007.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.

_____. *UUD 1945 sebagai Konstitusi yang Hidup*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2018.

Soehino. *Ilmu Negara*, Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 2013.

Soepandji, Kris Wijoyo. *Ilmu Negara : Prespektif Geopolitik Masa Kini*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2017.

Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*. Kencana. Jakarta. 2016.

Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006.

Thontowi, Jawahir. *Pancasila dalam Perspektif Hukum: Pandangan terhadap Ancaman the Lost Generation*. UII Press. Yogyakarta. 2016.

Titik, Triwulan Tutik. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Prenada Media Group. Depok. 2017.

Laws and Regulations :

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4316).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5226).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002

tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4189).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 170).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

- Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1981, Nomor 3209).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216).

- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1986 Nomor 77).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5).

Indonesia. Ketetapan MPR Sementara Republik Indonesia Nomor XX Tahun 1966 Tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Indonesia. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor III Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisan, Pembedaan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-undang.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Scientific Journals :

Adlhiyati, Zakki dan Achmad. *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami : Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*. Jurnal Hukum. Vol. 2 No. 2., 2019.

Agus, Nur Susanto. *"Tirani" Konstitusional*. Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3., 2013.

Al Amin, Ahmat Yusuf & Wibowo, Arif. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Penerapan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol.2 No.1., 2023.

Andriyadi, Fauza. *Good Governance Government and Government*. Lentera : Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies. Vol. 1, No. 2., 2019.

Anggono, Bayu Dwi. *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan : Permasalahan dan Solusinya*. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1., 2018.

Ardhanariswari, Riris, dkk, *Upholding Judicial Independence through the Practice of Judicial Activism in Constitutional Review: A Study by Constitutional Judges*, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. VI Issue 2, 2023.

Arfa'i, Nasution, Bahder Johan, dan Febrian, *Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2., 2020.

Asmarudin, Imam, dkk, *Initiating the Reform of Principle Norms in the Formation of Laws in Indonesia*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 12 Issue 2, 2024.

Blokker, Paul, *Dillema of Democratisation from Legal Revolution to Democratic Constitutionalism?*. Nordic Journal of International Law Vol. 18 No. 2., 2018.

Bo'a, Fais Yonas. *Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum*

- Nasional*. Jurnal Konstitusi Vol. 15 Nom., 2018.
- Butt, Simon, “*Indonesia’s Constitutional Court: conservative activist or Strategic operator?*”, In Björn Dresse. *The Judicialization of Politics in Asia*. Routledge. New York. 2012.
- Cahyono. *Mengoptimalkan Tingkat Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Metode Weak-Form Review*. Jurnal Rechtsvinding. Vol. 11 Nomor 1., 2022.
- Fauziah & Arrasuli, Beni Kharisma. *Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Self Executing dan Non-Self Executing dalam Rentang Tahun 2016-2019*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol. 7 Issue 2., 2023.
- Febriansyah, Ferry Irawan. *Muatan Kepentingan Politik Penentu Kualitas Undang-Undang*. Perspektif Volume XVII No. 3., Tahun 2012.
- Fernandes, Gustavo de Andrade, *Comparative Constitutional Law: Judicial Review*, dalam 3 U. Pa. *Journal Constitutional Law*. 977, 2001.
- Hadi, F. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Wijaya Putra Law Review. Jurnal Wijaya Putra Law Review Vol. 1, No. 2., 2020.
- Hamja, Buhar. *Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan dalam Konsep Negara Hukum dan Demokrasi*. Justisia Vol. VII No. 14., 2020.
- Hasim, Hasanuddin. *Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem*. Madani Legal Review Vol.1 No. 2, 2017.
- Hermawaty, Nety, dkk. *Kedudukan Judicial Review Sebagai Pembangunan Hukum di Indonesia*. Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol.1, No.1., 2021.
- Indrawan, Risnal. *Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*. Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1., Januari 2022.
- Laksono, Fadjar, Winda Wijayanti, dkk. *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI*. Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 4., 2013.
- Marwan, Awaludin, dkk. *Detection of Digital Law Issues and Implication for Good Governance Policy in Indonesia*. Bestuur Vol.9 No. 1., 2021.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi dari “Negative Legislature ke “Positive Legislature”?*. Konstitusi Press. Jakarta. 2016.
- Memeti, Ardit & Nuhija, Bekim. *The Concept of Erga Omnes Obligations in International Law*. New Balkan Politics Journal of Politics. Issue 14. 2013.
- Nggilu, Novendri. M. *Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal

Konstitusi. Volume 16, Nomor 1., Maret 2019.

- _____, dkk. *Constitutional Crisis : Intensifying Disobedience to the Decision of the Indonesian Constitutional Court*. Revista Chilena de Derecho. Vol. 50 No. 2., 2023.
- Peace, Laurel Anne, *Disobeying the Constitution: Interpretation and Modernization of New and Old Ideals Without Obligation and Obedience*, Marshall University Paper, Huntington, WV 25755.
- Prabandani, Hendra Wahanu. *Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*. Iblam Law Review. Vol. 2 No. 1., 2022.
- Pravidjayanto, Rafi. *Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Journal of Law and Syariah Vol. 2 No. 1., 2024.
- Priskap, Ridham. *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jilid 20, No. 1., 2020.
- Qamar, Nurul. *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol. I, No. 1., 2012.
- Rahmatullah, Indra dan Rizza Zia Agusty. *Memperkuat Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Bingkai Negara Hukum*. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 3 No. 2., 2016.
- Rotman, Anna, *Benin's Constitutional Court: An Institutional Model for Guaranteeing Human Rights*, Harvard Human Rights Journals, Volume 17, 2004.
- Rossitter, Clinton, *Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies*, United State, Princeton University Press, 2009.
- Safitri, Melani & Wibowo. Arif. *Peran Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia*. Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol.2 No.1., 2023.
- Shafiyah, Haritsa, dkk. *Hubungan Luar Negeri Aktor Subnasional: Kasus Kabupaten Garut di Indonesia dan Danyang-gum di Korea Selatan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nomor 2 Vol. 11. 2021.
- Siahaan, Maruarar. *Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi*. Jurnal Hukum. Nomor 3 Vol. 16., Juli 2009.
- Silaban, Virto & Kosariza. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Journal of Constitutional Law, Vol. 1 No. 1., 2021.
- Siallagan, Haposan. *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*. Sosiohumaniora. Vol. 18 No. 2., 2016.
- Soeroso, Fajar Laksono. *"Pembangkangan" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3., Desember 2013.

- Sulistiyowati, T. Nasef, M. I., & Rido, A. *Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan*. Jurnal Konstitusi. Vol. 17 No. 4., 2021.
- Sunarto. *Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* Makalah-Makalah Hukum. Jilid 45 No. 2.
- Tohadi dan Prastiwi, Dian Eka. *Rekonstruksi Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Checks and Balances*. Jurnal Rechtsvinding. Vol. 11 Nomor 1., 2022.
- Topane, Gayus Lumbuun. *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 6 No. 3., 2009.
- Utomo, Tri Widodo. *Dekonsentrasi dan Desentralisasi dalam Diskursus Negara Kesatuan dan Negara Federal*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. IX, No. 1., 2012.
- Van Crombrugge, Ronald, *Belgium and Democrate Constitutional-Making: Prospect for the Future*, Netherlands Journal of Legal Philosophy, No. 1., 2017.
- Widanti, Ni Putu Ngurah Rai. *Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik Sebuah Tinjauan Literatur*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1., 2022.
- Withyantim, Wira Paskah. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4. No. 2., 2020.
- Yunus, Ahsan. *Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol. III No. 2., November 2011.
- Zabavska, Khrystyna & Zavada, Yaryna. *The Checks and Balances System – The Evolution of Public Governance In a Historical and Theoretical Context*. Echa Przeszłości XXIV/1., 2023.

Research Reports, Thesis, and Dissertation :

- Romaliani, Karina, *Check and Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Skripsi*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2020.
- Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Adat Tanpa Kriminalisasi (Studi Implementasi Putusan No. 95/PUU XII/2014 di Masyarakat Adat Pekasa, Sumbawa, NTB), Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi [P4TIK] .2016.
- Asy'ari, Syukri, Hilipito, Meyrinda Rahmawaty & Ali, Mohammad Mahrus. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Pusat

Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. 2013.

Sulistyowati, Tri, M. Imam Nasef, & Ali Ridho. *Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara, Hasil Penelitian Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2019.

Budiharja, dkk. *Budi Utomo : Sejarah dan Kongres Pertama di Yogyakarta 1908*, Sebuah Kajian Koleksi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Yogyakarta. 2004.

Roznai, Yaniz. *Unconstitutional Constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers*. Thesis for applying degree of Doctor of Philosophy at Department of Law. 2014.

Media Online :

Hidayatulloh, Ndaru, I. Melvin. May 3, 2023. *Bagaiman Pelaksanaan Putusan MK yang Membatalkan Norma?*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-pelaksanaan-putusan-mk-yang-membatalkan-norma-cl4222/>. accessed on December 7, 2024.

Faiz, Ahmad. 19 December 2019. *Mahfud Md Sebut Ada Jual Beli Pasal di Indonesia*, <https://www.tempo.co/hukum/mahfud-md-sebut-ada-jual-beli-pasal-di-indonesia-673041>. accessed on December 7, 2024.

Mahkamah Konstitusi. — Rekapitulasi Pengujian Undang-Undang. <https://testing.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/puu>. accessed on December 8, 2024.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI. Database Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/>. accessed on December 8, 2024.

Huzaini, Moh. Dani Pratama. 19 November 2018. *Tiga Putusan Pengadilan Berbeda tentang Calon Anggota DPD*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-putusan-pengadilan-berbeda-tentang-calon-anggota-dpd-lt5bf27bca49b48/> accessed on December 10, 2024.

Catherine, Rahel Narda dan Erdianto, Kristian. 5 May 2021. *Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas, MAKI : Mengembalikan Independensi KPK*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/05/16044411/penyadapan-tak-perlu-izin-dewas-maki-mengembalikan-independensi-kpk>, accessed on December 10, 2024.

Heriani, Fitri Novia. August 22, 2024. *Batas Usia, DPR dan Presiden Dinilai*

- Langgar Konstitusi*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/abaikan-putusan-mk-terkait-batas-usia--dpr-dan-presiden-dinilai-langgar-konstitusi-lt66c6644f46160/?page=2>, accessed on December 13, 2024.
- Standford Encyclopedia of Philosophy. 30 June 2022. *Legal Obligation and Authority* <https://plato.stanford.edu/entries/legal-obligation/>, accessed on December 15, 2024.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, “*Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penguatan Ideologi Pancasila Tahun 2019*”, https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pip.pdf, accessed on December 18, 2024.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 18 Desember 2023. Kepala BPH: Penyuluhan Hukum Berperan Vital dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. <https://bphn.go.id/berita-utama/kepala-bphn-penyuluh-hukum-berperan-vital-dalam-meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat>, accessed on December 19, 2024.
- WJP Rule of Law Index 2024 Global Press Release. 23 October 2024. *The Global Rule of Law Recession Continues, But Some Progress Emerges*. <https://worldjusticeproject.org/news/wjp-rule-law-index-2024-global-press-release>, <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global>, accessed on December 19, 2024.
- Wijaya, Jeremy Putra. 25 March 2024. *Norma*. <https://binus.ac.id/character-building/2024/03/norma/>. accessed on January 1, 2025.
- Khoury, Tamara El. Desember 2017. *Pouvoir Constituant*. <https://oxcon.oupilaw.com/display/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e709>. retrieved January 9, 2025.

Other Resources :

- Soekarnoputri, Megawati, *Pidato Kebangsaan Memperingati Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 2011 dalam Historisitas dan Spiritualitas Pancasila*, disampaikan dalam Refleksi Peringatan 66 Tahun Hari Lahir Pancasila, Fraksi PDIP MPR RI.
- Winters, Jeffrey A. 2021, *Refleksi tentang Oligarki, Demokrasi, dan Supremasi Hukum di Indonesia*, Orasi Ilmiah yang disampaikan pada Peringatan Dies Natalis ke-75, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 February 2021.
- Mochtar, Zainal Arifin. 30 Agustus 2024. Webinar Konstitusi “*Memastikan Kepatuhan Konstitusi dalam Pemilihan Kepala Daerah*”, <https://www.youtube.com/watch?v=rUPpSlr6fa8&list=PLKjGJcK52UiGUjZpDDtp78WtCBxgg3SpV&index=13>, accessed on December 13, 2024.